

Pelatihan Manajemen Administrasi Desa Berbasis Digital bagi Perangkat Desa di Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo

Fory Armin Nawai¹, Arwildayanto², Tuti Wantu³

¹Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

²Universitas Negeri Gorontalo.

³Universitas Negeri Gorontalo.

email: forynawai@ung.ac.id

Abstract

The future of Indonesia lies in village development where its development requires human resources who are able to apply digital technology. Through the Village Development Thematic Community Service Program conducted by the Department of Educational Management, Faculty of Education (FIP), State University of Gorontalo (UNG) in 2021, digital-based village administration management training was conducted for village officials in Mootilango District, Gorontalo Regency with the aim of improving the quality of village government human resources. The method used is the lecture method, discussion, and direct practice of using digital-based village administration applications. The activity began with the signing of a cooperation agreement between the Dean of the FIP UNG and the Head of the Mootilango Subdistrict and the signing of the implementation of the cooperation between the Head of the Department of Educational Management, FIP UNG and all Village Heads in the Mootilango District. The training materials include Microsoft Word 2013, Microsoft Exel 2013, and training on the use of correspondence applications in villages. The activity was carried out well and was attended by all village officials. The community service team also carries out additional programs, namely: (1) socialization and assistance for the vaccination program, (2) making garbage bins, (3) making village administrative boundaries, (4) socializing the PHBS program, (5) teaching program at the Al-Qur'an recitation park, (6) sports tournament program, (7) mentoring for Integrated Services Post of cadres, (8) Sansevieria planting program, and (9) MTQ program. All of these programs were carried out well without any significant obstacles and the community responded well so that the results had a positive impact on the community.

Keywords: *Training; village administration management; digital technology.*

Abstrak

Masa depan Indonesia terletak pada pembangunan desa dimana pembangunannya membutuhkan SDM yang mampu menerapkan teknologi digital. Melalui program KKN Tematik Desa Membangun yang dilakukan Jurusan Manajemen Pendidikan FIP UNG Tahun 2021, dilakukan pelatihan manajemen administrasi desa berbasis digital bagi perangkat desa di Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo dengan tujuan meningkatkan kualitas SDM pemerintah desa. Metode yang digunakan adalah metode ceramah, diskusi, dan praktek langsung penggunaan aplikasi administrasi desa berbasis digital. Kegiatan tersebut diawali dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Dekan FIP UNG dengan Camat Mootilango dan penandatanganan implementasi kerja sama antara Ketua Jurusan Manajemen Pendidikan FIP UNG

dengan seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Mootilango. Materi pelatihan mencakup Microsoft Word 2013, Microsoft Exel 2013, dan pelatihan penggunaan aplikasi surat-menyurat di desa. Kegiatan tersebut terlaksana dengan baik dan diikuti oleh seluruh aparat desa. Tim pengabdian masyarakat juga melaksanakan program tambahan yaitu: (1) sosialisasi dan pendampingan program vaksinasi, (2) pembuatan bak sampah, (3) pembuatan batas-batas administrasi desa, (4) sosialisasi program PHBS, (5) program mengajar pada taman pengajian Al-Qur'an, (6) program turnamen olahraga, (7) pendampingan kader posyandu, (8) program penanaman Sansevieria, dan (9) program MTQ. Semua program tersebut terlaksana dengan baik tanpa ada kendala yang berarti dan masyarakat merespon dengan baik sehingga hasilnya memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Kata Kunci: Pelatihan; Manajemen Administrasi Desa; Teknologi Digital.

© 2022 Universitas Negeri Gorontalo

Under the license CC BY-SA 4.0

Correspondence author: Fory Armin Nawai, forynawai@ung.ac.id, Gorontalo, Indonesia

PENDAHULUAN

Desa merupakan suatu unit lingkungan masyarakat yang memiliki struktur pemerintahan tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan tentang tata kelola desa yang terbaru mengikuti Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Salah satu tujuannya adalah membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab; meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional, memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Dalam pembangunan nasional, desa memegang peranan yang sangat penting, sebab desa merupakan struktur pemerintahan terendah dari sistem pemerintahan Indonesia. Setiap jenis kebijakan pembangunan nasional pasti bermuara pada pembangunan desa sebab pembangunan Indonesia tidak akan ada artinya tanpa membangun desa. Masa depan Indonesia terletak dan tergantung dari keberhasilan membangun desa. Sehingga dengan semangat desentralisasi dalam otonomi daerah ini pemerintah desa dan masyarakat penting untuk dilibatkan atau diberdayakan dalam pembangunan desanya. Disadari atau tidak bahwa pembangunan desa telah banyak dilakukan sejak dari dahulu hingga sekarang, tetapi secara umum hasilnya belum memuaskan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Untuk mencapai hal tersebut, maka dibutuhkan pemerintah desa yang profesional dan efektif dalam melakukan manajemen pembangunan desa, dimana dalam menjalankan pemerintahannya di desa dengan dibantu oleh perangkat/aparatur desa.

Pemerintah desa dan segala perangkatnya merupakan garda terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Indonesia. Peran mereka dibutuhkan terutama di desa sebagai penggerak pemerintahan paling bawah di negeri ini. Pemerintahan di desa tentu bisa berjalan dengan baik bila didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) perangkat desa yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Di era Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) ini, kemampuan dan kehandalan perangkat desa dalam menggunakan teknologi berbasis digital dalam memajemen administrasi pemerintahan desa sangat diperlukan agar mereka bisa melakukan manajemen administrasi desa guna memberikan pelayanan publik yang

maksimal dan prima. Pemberian pelayanan publik yang maksimal dan prima kepada masyarakat merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat.

Penerapan teknologi berbasis digital pada pemerintahan desa akan memudahkan perangkat desa dalam menyelenggarakan administrasi desa (Zainudin, dkk., 2018). Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 47 Tahun 2016 menyatakan kepala desa dan perangkat desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa harus tertib administrasi. Administrasi desa merupakan keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa dengan segala urusan administrasinya, seperti administrasi umum, administrasi kependudukan, administrasi keuangan dan pembangunan, dan lain-lain. Tujuan dari penerapan teknologi berbasis digital adalah memberikan kemudahan dalam hal manajemen administrasi desa guna memberikan pelayanan publik yang maksimal dan prima seperti pelayanan administrasi kependudukan dan surat menyurat kepada masyarakat desa.

Kecamatan Mootilango merupakan salah satu wilayah administratif Kabupaten Gorontalo, yang terdiri dari beberapa desa dan masing-masing memiliki pemerintah desa yang berkewajiban untuk membangun desa. Untuk dapat menjalankan kewajiban tersebut, pemerintah dapat memaksimalkan kemajuan teknologi informasi dalam membangun desa. Kemajuan teknologi informasi saat ini yang berkembang dengan begitu pesat menyebabkan perubahan sistem kerja di semua lini organisasi pemerintahan termasuk organisasi pemerintahan di tingkat desa, yaitu dari sistem konvensional ke sistem yang berbasis digital. Kini banyak

sistem manajemen administrasi pemerintahan yang sifatnya konvensional beralih ke teknologi berbasis digital seperti penggunaan komputer dapat segala aplikasinya, website dan aplikasi berbasis android, ataupun juga aplikasi yang dirancang/dibangun atas inisiatif pemerintah desa dan juga oleh pemerintah di tingkat atasnya.

Berdasarkan hasil observasi awal, banyak aparat desa di Kecamatan Mootilango yang belum mampu menggunakan dan mengoperasikan fitur/aplikasi TIK berbasis digital. Sudah semestinya tiap aparat desa di Kecamatan Mootilango selaku pelayan administrasi publik harus mampu menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi informasi untuk memberikan layanan yang prima pada masyarakat. Untuk itu, sejalan dengan adanya kewajiban Universitas Negeri Gorontalo dalam menyelenggarakan tri dharma perguruan tinggi, salah satunya adalah pengabdian pada masyarakat, yaitu melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Desa Membangun yang dilaksanakan di Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo memandang perlu untuk dilakukan pelatihan manajemen administrasi desa berbasis digital bagi perangkat desa. Sudah semestinya bagi aparat desa di Kecamatan Mootilango untuk mampu menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi informasi berbasis digital untuk dapat memajemen dan memberikan layanan administrasi yang maksimal dan prima pada masyarakatnya. Hal ini penting untuk dilakukan karena pemanfaatan teknologi saat ini merupakan sesuatu hal yang tidak bisa dihindarkan, karena kebutuhan informasi yang sangat cepat, dan tepat menjadi suatu kebutuhan utama disegala aspek. Sehingga, pemahaman dan kemampuan penggunaan teknologi-teknologi berbasis digital menjadi suatu kewajiban bagi pemerintah desa dan semua perangkatnya.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan untuk pencapaian tujuan pada kegiatan pelatihan manajemen administrasi desa berbasis digital bagi perangkat Desa di Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo ini adalah menggunakan metode ceramah, diskusi, praktek langsung penggunaan aplikasi administrasi desa berbasis digital. Materi yang diajarkan pada setiap peserta yaitu mulai dari pelatihan microsoft word 2013, pelatihan microsoft exel 2013, dan pelaksanaan dan tata cara penggunaan aplikasi surat menyurat di Desa. Langkah-langkah operasional yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan dilaksanakan melalui tahapan berikut: (1) survey lokasi, (2) pra persiapan, (3) persiapan dan pembekalan, (4) pelaksanaan, dan (5) monitoring dan evaluasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Observasi Permasalahan dan Potensi Desa

Observasi permasalahan dilakukan di Desa Helumo dan Desa Payu Kecamatan Mootilango bertujuan untuk mengetahui dan menginventarisasi segala permasalahan-permasalahan serta potensi yang berkaitan dengan program inti maupun program tambahan KKN Desa Membangun. Hasil observasi tersebut dapat dijadikan sebagai bahan kajian dalam melaksanakan program kerja KKN Desa Membangun di Desa Helumo dan Desa Payu Kecamatan Mootilango. Hasil observasi mengenai peluang/potensi di desa tersebut kemudian dievaluasi dan diputuskan untuk dilaksanakan sebagai program tambahan untuk memaksimalkan partisipasi pelaksanaan kegiatan KKN Desa Membangun di Desa Helumo dan Desa Payu

Kecamatan Mootilango. Manfaat yang diharapkan dari observasi program tambahan ini adalah sebagai bahan kajian dalam membangun desa berdasarkan peluang/potensi di desa selain dari program utama yang direncanakan pada pelaksanaan program kerja KKN Desa Membangun. Hal tersebut dilakukan demi memaksimalkan segala peluang dan potensi yang ada di Desa Helumo dan Desa Payu Kecamatan Mootilango.

Sosialisasi Program Kerja

Sosialisasi program kerja ini dilaksanakan untuk menyampaikan tujuan utama dari pada program kerja KKN Desa Membangun yang hendak dilaksanakan di desa yaitu pelatihan manajemen administrasi desa berbasis digital bagi perangkat desa. Serta untuk memberikan pemahaman mengenai hasil-hasil observasi permasalahan kepada pemerintah desa dan seluruh masyarakat terkait tujuan pelaksanaan program kerja KKN Desa Membangun yang hendak dilaksanakan di desa.

Sosialisasi program kerja yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 di halaman kantor Desa Payu ini diikuti oleh aparat pemerintah desa Helumo dan dan desa Payu.

Penandatanganan Memorandum of Agreement (MoA) dan Implementation of Arrangement (IoA)

Demi memaksimalkan pelaksanaan program KKN Tematik Desa Membangun di Kecamatan Mootilango, langkah awal yang dilakukan oleh tim pengabdian pada masyarakat di Desa Helumo dan Desa Payu

adalah bermufakat dengan pemerintah setempat, baik itu pemerintah di tingkat kecamatan maupun tingkat desa terkait dengan program yang akan dilakukan. Melalui forum yang dihadiri oleh pemerintah tingkat desa, tingkat kecamatan, dan juga dihadiri langsung oleh Bupati Gorontalo, tim KKN Tematik Desa Membangun menguraikan maksud dan tujuan program KKN Tematik Desa Membangun di Kecamatan Mootilango, terutama adalah program pelatihan manajemen administrasi desa berbasis digital bagi perangkat desa. Hal ini penting untuk dilakukan karena tim KKN Tematik Desa Membangun melihat permasalahan terjadi di lapangan masih banyak para aparat desa yang belum paham tentang penggunaan teknologi berbasis digital. Hal ini selaras dengan program Pemerintah Kabupaten Gorontalo bahwa untuk menjadi aparat desa minimal sudah memahami dan mampu menggunakan teknologi berbasis digital.

Kesepakatan yang dilakukan sebagai bentuk komitmen bersama antara pemerintah setempat dengan tim pengabdian masyarakat KKN Tematik Desa Membangun UNG dalam membina dan meningkatkan kemampuan seluruh perangkat desa terhadap penggunaan teknologi berbasis digital. Melalui kesepakatan tersebut, program desa membangun berbasis masalah diharapkan menjadi sebuah program demi pencapaian SDGs (Sustainable Development Goals/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) sebagaimana yang diharapkan pemerintah pusat. Menurut Iskandar (2020) memberikan penegasan bahwa Secara keseluruhan SDGs bertujuan untuk menciptakan kehidupan manusia menjadi lebih baik dalam aspek sosial, ekonomi, serta dapat bersinergi dengan lingkungan. Oleh karena itu, SDGs memiliki tiga pilar utama yaitu pembangunan manusia, sosial ekonomi

dan lingkungan. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), paradigma pembangunan desa mengalami perubahan dratis dengan sumber daya dan potensi besar untuk mendukung pencapaian tujuan SDGs.

Alisjahbana dan Murniningtyas (2018) menegaskan bahwa SDGs menempatkan manusia sebagai pelaku sentral dan penikmat hasil pembangunan yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia atau human wellbeing. Sejak awal Indonesia menyadari bahwa pembangunan manusia sangat penting tidak hanya sebagai pemanfaat hasil pembangunan, namun manusia merupakan penentu bahwa pembangunan berkelanjutan akan dapat dijalankan atau tidak. Keterkaitan program ini dengan program SDGs adalah pada pilar pembangunan manusia. Pada pelatihan ini, pembangunan manusia difokuskan pada perangkat desa selaku bagian penting dari pemerintah desa, yang memiliki tugas dan peran penting dalam mendukung pencapaian program SDGs di desa.

Pelatihan Manajemen Administrasi Desa Berbasis Digital bagi Perangkat Desa di Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo

Pelatihan manajemen administrasi desa berbasis digital bagi perangkat desa dilakukan sebagai bentuk upaya tim KKN Tematik Desa Membangun UNG untuk memaksimalkan program pembangunan desa di Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo. Sesuai hasil observasi awal, perangkat desa di Kecamatan Mootilango hanya beberapa saja yang sudah bisa menggunakan aplikasi komputer seperti Microsoft Word dan Microsoft Excel. Para perangkat desa di Kecamatan Mootilango pada umumnya belum mahir menggunakan program-program standar di

komputer terutama Microsoft Word dan Microsoft Excel. Padahal kebutuhan akan penguasaan program komputer ini diperlukan bagi para perangkat desa untuk menunjang kegiatan administrasi dalam pelayanan kepada masyarakatnya sendiri. Sementara perangkat desa diwajibkan untuk memberikan kinerja yang lebih dalam pelayanan administrasi kepada masyarakatnya. Jika perangkat desa dapat menggunakan Microsoft Word dan Microsoft Excel dengan baik, maka akan baik pula dalam kinerja pelayanan administrasi desanya.

Peran teknologi sekarang ini sudah dapat dikatakan sangat membantu aktivitas manusia dalam melaksanakan kegiatan kesehariannya, baik dibidang politik, pendidikan, bisnis, serta dibidang-bidang lainnya (Ahmadi & Juliansa, 2019). Dalam hal penerapan komputersasi pelayanan administrasi pemerintahan di level desa juga harus memberikan yang terbaik guna membantu jalannya roda pemerintahan (Haerani & Repelita, 2020). Sesuai pernyataan Hariyadi, dkk. (2020), kemampuan manajemen administrasi akan meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kemampuan perangkat dalam mendokumentasikan arsip atau pengadministrasian di desa.

Sesuai analisis situasi dapat diidentifikasi permasalahan perangkat desa di Kecamatan Mootilango adalah tidak adanya pelatihan/pendidikan yang pernah diikuti baik itu secara formal maupun secara otodidak sehingga kurang mampu mengoperasikan aplikasi komputer khususnya penggunaan aplikasi Microsoft Word dan Microsoft Excel. Untuk itu, perangkat desa perlu dilatih kompetensinya menggunakan aplikasi tersebut dan juga aplikasi untuk kebutuhan surat-

menyurat. Pelatihan tersebut bertujuan membantu para perangkat desa di Kecamatan Mootilango dalam melakukan kegiatan pencatatan dan administrasi data yang lebih baik. Hal tersebut sejalan dengan Sormin, dkk. (2018) bahwa pelatihan penggunaan aplikasi komputer dilaksanakan agar kepala desa dan perangkatnya mampu menggunakan perangkat lunak komputer yang sudah ada dan berkembang pesat sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai, sehingga ketertinggalan teknologi di desa berkurang dan setiap kepala desa lebih mudah dan praktis dalam kinerja administrasi yang ada di desa masing-masing.

Kegiatan pelatihan diikuti oleh seluruh perangkat desa di Kecamatan Mootilango, yaitu: Desa Helumo, Desa Payu, Desa Paris, Desa Satria, Desa Huyula, Desa Karyamukti, Desa Pilomohu, Desa Sidomukti, Desa Sukamaju, dan Desa Talumopatu. Materi yang disajikan dalam pelatihan manajemen administrasi desa berbasis digital tersebut diantaranya adalah pelatihan Microsoft Word 2013, pelatihan Microsoft Exel 2013, dan pelatihan penggunaan aplikasi surat menyurat di desa. Sesuai pernyataan Rokhman, dkk. (2018), salah satu program aplikasi perkantoran yang saat ini berkembang seiring dengan teknologi informasi dan komunikasi adalah Microsoft office yang dapat digunakan untuk melakukan pengolahan dokumen dan administrasi. Microsoft Office ini terbagi dalam beberapa jenis diantaranya adalah Microsoft Word digunakan untuk pengolah kata dan Microsoft Excel digunakan untuk pengolah angka. Sejalan dengan pernyataan Desiani, dkk. (2021) bahwa dengan memanfaatkan aplikasi Microsoft Office diharapkan bagi setiap perangkat desa dapat menggunakannya dalam mengurus administrasi desa. Sistem administrasi desa yang baik dan benar akan

menciptakan tertib administrasi, yaitu dapat menyajikan data dan informasi yang mudah bagi masyarakat dan bagi pemerintah desa dalam membuat kebijakan. Hal ini juga diperkuat oleh Sormin, dkk. (2018) bahwa aplikasi komputer berupa Microsoft Office seperti Word dan Excel dapat membantu kinerja dalam penulisan surat atau mempermudah administrasi desa.

Pelatihan penggunaan aplikasi komputer seperti program pengolah kata (Microsoft Word), dan pengolah angka (Microsoft Excel) penting untuk dilakukan bagi perangkat desa di Kecamatan Mootilango karena mereka senantiasa tidak luput dari kegiatan mengolah kata dan angka dalam bidang administrasi desa. Seperti dikemukakan Lestari & Lestari (2019) bahwa program aplikasi perkantoran yang paling sering digunakan sehari-hari untuk kegiatan administrasi perkantoran adalah program pengolah kata (Microsoft Word), dan pengolah angka (Microsoft Excel). Kemampuan mengoperasikan program tersebut sangat penting terutama bagi yang menekuni pekerjaan dibidang administrasi perkantoran. Walaupun program tersebut bisa dipelajari secara autodidak, namun peran mentor atau instruktur sangat penting dalam mengarahkan penggunaan program tersebut.

Aplikasi Microsoft Word dan Microsoft Excel yang menjadi materi pelatihan merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Microsoft, sedangkan aplikasi surat menyurat di desa yang digunakan dalam pelatihan adalah aplikasi yang dibawakan langsung oleh tim pengabdian pada masyarakat. Aplikasi ini hanya khusus untuk digunakan untuk kegiatan surat-menyurat di desa. Hal ini dilakukan untuk mempermudah bagi aparat desa untuk dapat membuat surat secara praktis sesuai

dengan tujuan penggunaannya. Dalam kegiatan administrasi di desa, hal yang sering dilakukan adalah pembuatan surat, sehingga aplikasi surat menyurat merupakan hal yang sangat penting dan dibutuhkan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Nursetiawan (2020) bahwa salah satu bentuk dari pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah desa sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan desa, yakni dalam pemberian pelayanan mengenai administrasi, seperti surat.

Kegiatan pelatihan manajemen administrasi desa berbasis digital bagi perangkat desa dapat diselenggarakan dengan baik, dan diikuti dengan baik oleh seluruh pesertanya sehingga diharapkan dapat implementasikan dengan baik dalam kegiatan manajemen administrasi di desanya masing-masing. Penggunaan teknologi komputer berbasis digital berupa aplikasi perkantoran seperti Microsoft Office diharapkan dapat digunakan oleh perangkat desa yang mengikuti kegiatan pelatihan. Sofianto (2019) menegaskan bahwa aparatur pemerintah dituntut untuk mampu bekerja sesuai dengan perkembangan teknologi sebagai instrumen dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Hal ini didorong oleh tumbuhnya model komunikasi baru yang berkembang seiring pesatnya pengiriman data dan administrasi desa melalui jaringan internet dan media sosial.

Di lingkungan pedesaan, penggunaan teknologi komputer kini bukan lagi hal yang dikesampingkan, tetapi sudah menjadi hal yang utama untuk digunakan oleh perangkat desa untuk diterapkan dalam manajemen administrasi desa. Hal tersebut sejalan dengan Purba, dkk. (2018) bahwa arus perkembangan teknologi informasi berbasis digital yang semakin pesat telah merambah hingga ke pedesaan. Teknologi

informasi berbasis digital bukan lagi hal baru bagi masyarakat desa, sehingga aparatur pemerintahan desa yang berada di lingkungan tersebut sudah semestinya menjadikan teknologi informasi berbasis digital sebagai pendukung dalam upaya mengefektifkan layanan kepada masyarakat.

Inti dari kegiatan pelatihan adalah memberdayakan perangkat desa sebagai bagian penting dari pemerintah desa dalam mewujudkan program pembangunan di desa. Dengan adanya keterampilan aparat/perangkat desa dalam menggunakan teknologi berbasis digital diharapkan dapat memaksimalkan pelayanan administrasi desa dalam rangka optimalisasi penggunaan teknologi digital dan peningkatan layanan pada masyarakat akan kinerja pemerintah desa. Seperti dikemukakan Mayowan (2017) bahwa pelaksanaan program untuk memampukan aparatur desa dalam mengelola teknologi berbasis digital melalui pelatihan penting untuk dilakukan. Teknologi berbasis digital dapat menjadi alat untuk memperbaiki administrasi desa. Pengelolaan data dan administrasi desa yang baik akan mendukung kinerja pemerintah desa sesuai azas efisien dan efektif, pembakuan, akuntabilitas, keterkaitan, kecepatan dan ketepatan, keamanan, ketelitian, kejelasan, singkat dan padat,serta dan logis dan meyakinkan dalam rangka penyusunan perencanaan desa, perbaikan administrasi desa dan pelayanan publik. Hartati & Pertiwi (2014) menegaskan bahwa pelayanan publik merupakan segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dalam bentuk barang dan jasa baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan.

Program Jumat Bersih

Program Jumat bersih ini dilaksanakan untuk menumbuhkan rasa cinta, rasa memiliki dan rasa kepedulian di kalangan masyarakat akan pentingnya kebersihan bangunan masyarakat dan lingkungan desa demi kesehatan, sehingga suasana desa terasa nyaman, dan terpelihara dengan baik, dan lingkungan yang bebas dari sampah dan sumber penularan penyakit, serta timbulnya rasa cinta dan kesadaran masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar. Masyarakat memiliki tanggung jawab atas kondisi lingkungannya, menjaga lingkungannya agar tetap bersih. Tujuan diadakannya jum'at bersih yaitu untuk menjaga dan meningkatkan kebersihan dan kesehatan lingkungan desa terutama lingkungan di sekitar di bangunan umum seperti masjid sehingga masyarakat merasa nyaman di lingkungan tersebut. Selain itu, kegiatan jumat bersih ini dapat membangun hubungan dan menjalin silaturahmi dengan masyarakat sekitar.

Membuat Bak Sampah

Pembuatan bak sampah ini bertujuan untuk memberikan tempat khusus bagi masyarakat yang ingin membuang sampah, baik sampah organik maupun non organik, dan mengurangi perilaku membuang sampah sembarangan terutama di lingkungan strategis masyarakat sehingga sampah tidak berserakan. Dengan adanya sarana tempat pembuangan sampah ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam mengelola sampah dan menjaga kebersihan lingkungan sehingga terwujud lingkungan desa yang bersih dan nyaman. Ketersediaan bak sampah di lingkungan masyarakat atau tempat strategis menjadikan

masyarakat tidak lagi kesulitan tempat untuk pembuangan sampah. Adanya bak sampah di tempat umum sangat mendukung masyarakat berpartisipasi menjaga kebersihan lingkungan.

Pembuatan Batas-Batas Administrasi Desa

Untuk memaksimalkan Program KKN Tematik Desa Membangun di Desa Helumo dan Desa Payu Kecamatan Mootilango, tim pengabdian masyarakat juga melakukan pembuatan tanda dan batas-batas administrasi desa. Penegasan atau penetapan batas desa merupakan suatu hal yang perlu dilakukan di era otonomi daerah ini. Penegasan batas-batas administrasi desa sebagai bentuk upaya untuk meredam persoalan batas wilayah yang biasanya dapat menimbulkan konflik dan mengganggu stabilitas di suatu wilayah. Batas-batas administrasi desa yang tidak jelas akan memicu konflik di suatu wilayah. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Pasal 2, disebutkan bahwa penetapan dan penegasan batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis. Untuk itu, tim pengabdian masyarakat KKN Tematik Desa Membangun berupaya untuk memberikan perantara dalam membuat batas-batas administrasi desa di Kecamatan Mootilango, untuk membantu pemerintah setempat dalam menetapkan dan membuat batas-batas administrasi desa. Menurut Umra (2015), pada pelaksanaan kegiatan penegasan batas wilayah terdapat dua aspek yang harus diperhatikan yaitu aspek teknis dan non teknis. Aspek teknis meliputi kegiatan pengkajian sumber-sumber hukum (dokumen) tentang lokasi

batas, pelacakan lokasi batas wilayah dilapangan, pemasangan pilar dan pemetaan batas wilayah, sedangkan aspek non teknis meliputi koordinasi antar instansi dan sosialisasi pada masyarakat yang terkait dengan situasi dan kondisi diwilayah perbatasan.

Pembuatan batas administrasi desa batas desa tersebut adalah salah satu upaya untuk memberikan penegasan batas-batas administrasi setiap dusun yang ada di Desa Helumo dan Desa Payu. Tim pengabdian masyarakat KKN Tematik Desa Membangun menyadari akan pentingnya kegiatan penetapan batas wilayah administrasi, dan untuk membantu dalam pelaksanaan batas wilayah sehingga dapat diterima oleh dua belah pihak yang berbatasan. Agar batas dusun tersebut dapat diterima oleh semua pihak, maka dalam pembuatan batas-batas administrasi desa yang dilakukan didukung oleh dokumen otentik berupa peta batas wilayah dan tanda fisik di lapangan. Dalam pembuatan batas-batas desa tersebut mengacu pada petunjuk dan bukti otentik yang ditunjukkan oleh setiap pemerintah desa di Desa Helumo dan Desa Payu.

Kegiatan pembuatan batas-batas administrasi desa di Desa Helumo dan Desa Payu Kecamatan Mootilango berjalan dengan baik dan tanpa ada kendala yang berarti. Tiada ada pertentangan yang terjadi diantara masyarakat maupun pemerintah desa terkait pembuatan batas-batas administrasi desa tersebut. Biasanya dalam membuat tanda batas administrasi suatu wilayah bisa menimbulkan pro kontra antar masyarakat di suatu wilayah. Sebagaimana dikemukakan Satrya & Parwata (2018) bahwa penegasan batas wilayah merupakan salah satu bentuk pembangunan yang dilakukan daerah untuk meningkatkan

kesejahteraan dan mutu kehidupan masyarakatnya. Setiap tindakan pemerintah dalam tujuan melaksanakan pembangunan, tentunya mendapat pro dan kontra dari masyarakat.

Sosialisasi Program Perilaku Hidup Sehat dan Bersih (PHBS)

Sosialisasi Program PHBS (Perilaku Hidup Sehat dan Bersih) bertujuan untuk mengajarkan dan memberikan informasi terkait pentingnya kesehatan dan penerapan kebersihan diri dan lingkungan kepada masyarakat melalui penerapan pola hidup bersih yang baik dan menyehatkan. Sosialisasi PHBS diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesehatan melalui proses penyadartahuan yang menjadi awal dari kontribusi individu-individu dalam menjalani perilaku kehidupan sehari-hari yang bersih dan sehat, dan terbentuknya anggota masyarakat sebagai agen perubahan agar mampu meningkatkan kualitas perilaku sehari-hari sesuai dengan tujuan hidup bersih dan sehat.

Bila perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) ini tidak dilakukan dengan baik maka akan menimbulkan dampak yang tidak diinginkan yaitu munculnya berbagai penyakit (Diana, dkk., 2013). Banyak faktor yang mempengaruhi perilaku hidup bersih dan sehat seperti kebiasaan di rumah, lingkungan masyarakat, sekolah, dan lain-lain. Pembiasaan penerapan PHBS yang perlu dilakukan secara rutin seperti membersihkan diri sendiri seperti: menyikat gigi, buang air, dan mandi. Menjaga kebersihan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, membersihkan peralatan makan, dan yang paling penting adalah memahami keterampilan hidup sehat (Julianti, dkk., 2018).

Mengajar pada Taman Pengajian Al-Qur'an

Program mengajar pada Taman Pengajian Al-Qur'an (TPQ) di Desa Helumo dan Desa Payu ini ditujukan untuk memaksimalkan peran taman pengajian Al-Qur'an yang ada di desa dan memotivasi para santri untuk aktif dalam kegiatan membaca, menulis, menghafal, dan mengamalkan kandungan Al-Qur'an. Demi kontinuitas penguatan peran TPQ dalam pendidikan karakter religius (Islam) tim pengabdian melakukan pendampingan untuk menyokong kegiatan pengajian yang rutin dilakukan di taman pengajian Al-Qur'an. Program ini diharapkan dapat mewujudkan peran aktif taman pengajian Al-Qur'an yang ada di desa sehingga para santri memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik dalam membaca, menulis, menghafal, dan mengamalkan kandungan Al-Qur'an. Menurut Suyitno (2018) dengan diselenggarakannya TPQ sebagai lembaga pendidikan Islam non formal di lingkungan masyarakat dapat membantu peluang kepada orang tua untuk mendidik anak-anaknya mengikuti dan mendalami pendidikan Islam. TPQ memiliki peranan penting untuk menyiapkan generasi penerus bangsa yang berakhlakul karimah serta berkontribusi pada pendidikan karakter, terutama karakter religius.

TPQ mempunyai andil dalam usaha pembentukan watak religius dengan berbasis pada nilai-nilai agama Islam (Retnasari, dkk., 2019). Keberadaan lembaga pendidikan Al-Qur'an membawa misi yang sangat mendasar terkait dengan pentingnya memperkenalkan dan menanamkan nilai-nilai Al-Qur'an sejak usia dini. Tujuannya adalah memberikan bekal dasar bagi anak didik (santri) agar mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid dan

juga menanamkan nilai-nilai keislaman bagi peserta didik (santri) sekaligus membekalinya dengan ilmu keagamaan (Aliwar, 2016).

Pendampingan Program Vaksinasi untuk Pencegahan Penyebaran Covid-19

Menyikapi terkait pandemi Covid-19, yaitu selain kegiatan pelatihan manajemen administrasi desa berbasis digital bagi perangkat desa, tim pengabdian pada masyarakat KKN Tematik Desa Membangun juga berperan aktif dalam kegiatan pendampingan program vaksinasi yang diselenggarakan Desa Helumo dan Desa Payu bekerjasama dengan Kepolisian Daerah (Polda) Gorontalo. Melalui kegiatan pendampingan tersebut, tim KKN Tematik Desa Membangun berperan aktif mensosialisasikan pelaksanaan vaksin serta pelaksanaan protokol kesehatan kepada masyarakat di Desa Helumo dan Desa Payu di Kecamatan Mootilango. Hal tersebut sebagai wujud komitmen untuk percepatan program vaksinasi agar masyarakat terhindari dari resiko terpaparnya Covid-19. Sejalan dengan hal itu, Akbar (2021) juga menyatakan bahwa pemerintah juga sedang gencar melakukan sosialisasi pentingnya vaksinasi ini untuk memutus rantai penyebaran Covid-19. Ichsan, dkk. (2021) menegaskan bahwa vaksin merupakan solusi terakhir untuk penyakit menular. Hambatan utama penggunaan vaksin Covid-19 adalah keraguan masyarakat terhadap vaksin. Persepsi masyarakat tentang keamanan dan efektivitas vaksin Covid-19 harus baik. Sesuai pernyataan Gandryani & Hadi (2021) bahwa di tengah masyarakat terjadi pro dan kontra terkait pelaksanaan vaksinasi di Indonesia.

Walaupun tim KKN Tematik Desa Membangun tidak termasuk sebagai Satgas Covid-19, namun perannya dalam mendampingi Satgas dan lebih utama melakukan sosialisasi vaksinasi kepada masyarakat, bahwa vaksinasi bukan hal yang menakutkan dan mengerikan. Tim KKN Tematik Desa Membangun melibatkan diri dalam rangka percepatan vaksinasi di setiap wilayah kecamatan dan desa dengan cara mendampingi dan terutama ikut memberikan sosialisasi. Tak hanya berperan mendampingi dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, namun juga mengajak semua elemen masyarakat untuk agar melakukan vaksinasi. Hal tersebut perlu dilakukan karena menurut Astuti, dkk. (2021) bahwa keragu-raguan yang muncul dari masyarakat disebabkan karena kurangnya informasi yang memadai. Dalam menangani keragu-raguan vaksin Covid-19 yang meluas mengharuskan adanya kolaborasi upaya pemerintah, pembuat kebijakan kesehatan, dan sumber media, termasuk media sosial perusahaan yang direkomendasikan untuk membangun kepercayaan vaksinasi Covid-19 dalam kalangan umum publik, melalui penyebaran pesan yang tepat waktu dan sangat jelas melalui saluran advokasi terpercaya dalam keamanan dan kemanjuran vaksin Covid-19 yang sudah tersedia saat ini.

Melalui sosialisasi disampaikan kepada masyarakat bahwa vaksin bukan hal yang menakutkan namun tujuan untuk meningkatkan imunitas dan kekebalan tubuh dan tak henti-hentinya juga memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya penerapan protokol kesehatan. Dalam sosialisasi juga masyarakat disarankan untuk senantiasa mengonsumsi makanan sehat dan vitamin kepada masyarakat dalam rangka peningkatan imunitas tubuh. Sebagaimana dikemukakan Putri, dkk. (2021) bahwa kecemasan masyarakat tentu

akan berpengaruh terhadap penurunan imunitas seseorang serta penerimaan seseorang terhadap vaksin covid-19. Pada sisi lain, penurunan imunitas akan meningkatkan seseorang terpapar covid-19. Astuti, dkk. (2021) menambahkan bahwa diperlukan kapasitas sistem kesehatan yang memadai, serta strategi untuk meningkatkan kepercayaan dan penerimaan vaksin dan bagi mereka yang akan melaksanakan vaksinasi.

Program vaksinasi bagi masyarakat di Desa Helumo dan Desa Payu di Kecamatan Mootilango penting untuk dilakukan karena masih banyak masyarakat yang belum tervaksinasi. Hal ini teridentifikasi dari data di setiap kecamatan di Kabupaten Gorontalo dimana jumlahnya masih sangat minim capaian terhadap pemberian vaksinasi. Ada beberapa kecamatan perbandingan dengan jumlah penduduk yang belum tervaksin lebih tinggi dan dibanding dengan yang sudah divaksin. Sehingga diperlukan upaya sosialisasi yang maksimal untuk pelaksanaan vaksinasi kepada masyarakat.

Turnamen Olahraga

Olahraga merupakan salah satu hal yang fundamental dalam meningkatkan kebugaran jasmani dan juga kesehatan. Kegiatan turnamen olahraga ini dilaksanakan untuk membangun rasa cinta bagi masyarakat terhadap olahraga dan memaksimalkan fasilitas ruang publik untuk kegiatan olahraga sebagai sarana ampuh guna menarik perhatian masyarakat untuk hadir dan berkumpul melakukan aktivitas jasmani dan berinteraksi sosial. Kegiatan ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mewujudkan interaksi sosial yang baik di lingkungan masyarakat sebagai sarana komunikasi dalam rangka membangun desa disertai dengan jiwaspportivitas, kerjasama, persahabatan, kepedulian, dan lain-lain.

Olahraga merupakan suatu media bagi manusia untuk berkumpul, bertindak dan berekspresi, karena dalam berolahraga manusia memiliki kebebasan untuk bergerak secara individu dan kelompok. Aktivitas olahraga dalam masyarakat sebagian besar telah diorganisir dengan baik. Disamping itu pembinaan olahraga juga telah menjadi kebutuhan yang diperlukan baik pada kalangan masyarakat maupun lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Pembinaan olahraga sepertinya telah menjadi harapan bagi pelakunya untuk meningkatkan kebugaran jasmani seseorang. Kesiapan olahraga dapat memberi kontribusi yang begitu besar terhadap masyarakat untuk memahami dan menyadari akan arti, fungsi dan manfaat olahraga, hal ini dapat dilihat dari meningkatnya motivasi masyarakat memadati lapangan olahraga. Selanjutnya bukti lain dapat dilihat dari banyaknya klub-klub olahraga yang dapat memberikan layanan jasa dibidang olahraga, melalui klub-

klub tersebut masyarakat dapat berlatih secara terarah tentu sesuai dengan cabang olahraga yang digemari (Aswadi, dkk., 2015).

Pendampingan Kader Posyandu

Pendampingan kader posyandu ini bertujuan untuk memberikan penguatan dan motivasi serta citra diri kader Posyandu sebagai wadah pemeliharaan kesehatan yang dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat di desa dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam upaya pelayanan kesehatan dan keluarga berencana di tengah masyarakat. Sehingga kader posyandu dapat menjadi wahana gerakan reproduksi keluarga sejahtera, gerakan ketahanan keluarga, dan gerakan ekonomi keluarga yang diikuti oleh peran serta masyarakat dalam mengembangkan kegiatan kesehatan dan keluarga berencana serta kegiatan lainnya yang menunjang tercapainya masyarakat sehat sejahtera.

Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan masyarakat bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat. Kader posyandu adalah seorang yang karena kecakapannya atau kemampuannya diangkat, dipilih dan atau ditunjuk untuk memimpin pengembangan posyandu disuatu tempat atau desa. Peran kader memantau pertumbuhan anak atau balita, mengadakan penyuluhan terkait tentang kesehatan ibu dan anak sehingga masyarakat mengetahui dan mampu mempraktekkan apa saja yang perlu diperhatikan dalam penanganan anak, ibu hamil ataupun ibu menyusui (Juliati, dkk., 2019). Kader posyandu adalah warga masyarakat yang ditunjuk untuk bekerja secara sukarela dalam melaksanakan kegiatan

yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan sederhana di posyandu. Kader posyandu dipilih oleh pengurus posyandu dari anggota masyarakat yang bersedia, mampu dan memiliki waktu untuk menyelenggarakan kegiatan posyandu (Lubis & Syahri, 2015). Pengakuan kader sebagai seseorang yang sangat dibutuhkan bagi masyarakat memang diperlukan. Oleh karena itu, program pendampingan sangat dibutuhkan untuk keberlanjutan program posyandu (Wirapuspita, 2013).

Program PenanamanTanaman Sansevieria

Program penanaman tanaman Sansevieria di Desa Helumo dan Desa Payu ini merupakan program dari pemerintah Kabupaten yang dilombakan pada tingkat desa. Program ini bertujuan untuk membangun Desa Helumo dan Desa Payu sebagai desa yang bernuansa alam yang hijau, indah, asri, dan lestari dan mengajak masyarakat untuk cinta terhadap kelestarian lingkungan. Program ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mewujudkan Desa Helumo dan Desa Payu menjadi desa hijau, indah, asri, dan lestari yang memberikan peran positif terhadap penurunan polusi udara dan terjadinya proses penyerapan karbon secara maksimal, dan menghasilkan oksigen sehingga membuat kualitas udara di desa menjadi lebih baik.

Program MTQ

Program MTQ (Musabaqah Tilawatil Qur'an) ini bertujuan untuk memelihara, mengembangkan, dan/atau meningkatkan pengetahuan dan pemahaman, serta rasa cinta, penghayatan, pengamalan, dan/atau penyebarluasan al-Qur'an dan menjadikan al-Qur'an sebagai spirit

pembangunan di desa melalui pendekatan nilai-nilai islam sehingga terbangunnya desa dan lingkungan masyarakat yang bernuansa religius di Desa Helumo dan Desa Payu. Karakter religius sangat diperlukan sebagai pondasi bagi individu untuk berkarakter. Karakter religius merupakan cerminan keimanan terhadap Sang Maha Kuasa. Adapun nilai-nilainya meliputi toleransi, cinta damai, persahabatan, teguh pendirian, ketulusa, percaya diri, anti perundungan dan kekerasan, tidak memaksakan kehendak, mencintai lingkungan, kerjasama antar pemeluk agama dan kepercayaan, menghargai perbedaan agama dan kepercayaan, melindungi yang kecil dan tersisih.

KESIMPULAN

Program KKN Tematik Desa Membangun yang difokuskan di Desa Helumo dan Desa Payu Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo disambut dengan baik oleh pemerintah setempat yang menghasilkan suatu mufakat bersama yang ditandai dengan adanya penandatanganan MoA antara Dekan FIP UNG dengan Camat Mootilango dan penandatanganan IoA antara Ketua Jurusan Manajemen Pendidikan FIP UNG dengan seluruh kepala desa di Kecamatan Mootilango. Kesepakatan yang dilakukan sebagai bentuk komitmen bersama antara pemerintah setempat dengan tim pengabdian masyarakat KKN Tematik Desa Membangun dalam membina dan meningkatkan kemampuan seluruh perangkat desa terhadap penggunaan teknologi berbasis digital. Upaya tim pengabdian masyarakat dalam mengadakan pelatihan manajemen administrasi desa berbasis digital bagi perangkat desa terlaksana dengan baik. Pelatihan manajemen administrasi desa berbasis digital berupa pelatihan menggunakan aplikasi Microsoft Word

2013, Microsoft Exel 2013, dan pelatihan penggunaan aplikasi surat menyurat di desa diikuti dengan antusiasme tinggi oleh seluruh perangkat desa se Kecamatan Mootilango.

Melalui program KKN Tematik Desa Membangun, tim pengabdian pada masyarakat ikut berperan aktif dalam program kegiatan diantaranya adalah: (1) sosialisasi dan pendampingan program vaksinasi yang diselenggarakan oleh Kepolisian Daerah (Polda) Gorontalo, (2) pembuatan bak sampah untuk memberikan tempat khusus bagi masyarakat dalam membuang sampah dan mengurangi perilaku membuang sampah sembarangan, (3) pembuatan batas-batas administrasi desa di wilayah Kecamatan Mootilango, (4) sosialisasi program PHBS dilakukan sebagai upaya untuk mengajarkan, memberikan informasi, dan penyadartahuan terkait pentingnya kesehatan dan penerapan kebersihan diri dan lingkungan kepada masyarakat melalui penerapan pola hidup bersih yang baik dan menyehatkan, (5) program mengajar pada taman pengajian Al-Qur'an untuk memaksimalkan peran taman pengajian Al-Qur'an yang ada di desa dan memotivasi para santri untuk aktif dalam kegiatan membaca, menulis, menghafal, dan mengamalkan kandungan Al-Qur'an, (6) program turnamen olahraga untuk membangun rasa cinta bagi masyarakat terhadap olahraga dan memaksimalkan fasilitas ruang publik untuk kegiatan olahraga sebagai sarana ampuh bagi masyarakat untuk hadir dan berkumpul melakukan aktivitas jasmani dan berinteraksi sosial, (7) pendampingan kader posyandu, dilakukan untuk memberikan penguatan dan motivasi serta citra diri kader Posyandu di Kecamatan Mootilango, (8) program penanaman tanaman *Sansevieria* sebagai sarana untuk membangun desa yang bernuansa alam yang hijau, indah,

asri, dan lestari dan mengajak masyarakat untuk cinta terhadap kelestarian lingkungan, dan (9) program MTQ untuk memelihara, mengembangkan, dan/atau meningkatkan pengetahuan dan pemahaman, rasa cinta, penghayatan, pengamalan al-Qur'an dan menjadikan Al-Qur'an sebagai spirit pembangunan di desa melalui pendekatan nilai-nilai islam sehingga terbangunnya desa dan lingkungan masyarakat yang bernuansa religius. Semua program kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik tanpa ada kendala yang berarti dan masyarakat merespon dengan baik terhadap semua program yang dilaksanakan sehingga hasilnya memberikan dampak positif bagi masyarakat di Kecamatan Mootilango terutama Desa Helumo dan Desa Payu.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Gorontalo yang mendukung pelaksanaan kegiatan ini.

REFERENCES

- Ahmadi & Juliansa, H. (2019). Rancang bangun sistem informasi digital layanan administrasi publik desa berbasis WEB responsive. Jurnal Ilmiah Informatika Global, 10(1), 20-25. DOI: <http://dx.doi.org/10.36982/jiig.v10i1.731>*
- Akbar, I. (2021). Vaksinasi covid-19 dan kebijakan negara: perspektif ekonomi politik. Jurnal Academia Praja, 4(1), 244-254. DOI: <https://doi.org/10.36859/jap.v4i1.374>*

- Alisjahbana, A.S., & Murniningtyas, E. (2018). *Tujuan pembangunan berkelanjutan di indonesia: konsep, target dan strategi implementasi*. Bandung: Unpad Press.
- Aliwar. (2016). *Penguatan model pembelajaran baca tulis Al-Qur'an dan manajemen pengelolaan organisasi (TPA)*. *Jurnal Al-Ta'dib*, 9(1), 21-37.
- Astuti, N.P, Nugroho, E.G.Z, Lattu, J.C, Potempu, I.R, & Swandana, D.A. (2021). *Persepsi masyarakat terhadap penerimaan vaksinasi covid-19: Literature review*. *Jurnal Keperawatan Volume*, 13(3), 569-580. DOI: <https://doi.org/10.32583/keperawatan.v13i3.1363>
- Aswadi, Amir, N., & Karimuddin. (2015). *Penelitian tentang perkembangan cabang olahraga futsal di Kota Banda Aceh tahun 2007-2012*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unsyiah Volume*, 1(1), 38-44.
- Diana, F.M., Susanti, F., & Irfan, A. (2013). *Pelaksanaan program perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di SD Negeri 001 Tanjung Balai Karimun*. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 8(1), 46-51.
- Gandryani, F., & Hadi, F. (2021). *Pelaksanaan vaksinasi covid-19 di Indonesia: Hak atau Kewajiban Warga Negara*. *Jurnal Rechtsviding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(1), 23-41. DOI: <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i1.622>

- Haerani, R., & Repelita, R. (2020). *Pelatihan penggunaan aplikasi microsoft office dalam meningkatkan pelayanan administrasi bagi pegawai kantor Desa Harjatani Kramatwatu Serang-Banten*. *Jurnal Minda Bahari*, 4(2), 68-77. DOI: <https://doi.org/10.33373/jmb.v4i2.2692>
- Hariyadi, A., Hawa, M., Sutrimah, Sofwani, S.A., & Yuliani, E. (2020). *Pelatihan manajemen pengelolaan administrasi menggunakan metode demonstrasi di Wotsogo Jatirogo Tuban*. *Indonesian Engagement Journal*, 2(2), 181-187. DOI: <https://doi.org/10.21154/inej.v1i2.2333>
- Hartati, S., & Pertiwi, P. (2014). *Pemanfaatan electronic government dalam pemberdayaan pemerintah & potensi desa berbasis WEB pada Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan*. *Jurnal TAM (Technology Acceptance Model)*, 3, 11-20.
- Higau, C.B.H. (2015). *Pelaksanaan administrasi pemerintahan desa dalam meningkatkan pelayanan masyarakat di Desa Matalibaq Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu*. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 3(3), 1448-1459.
- Ichsan, D.S, Hafid, F., Ramadhan, K., & Taqwin. (2021). *Determinan kesediaan masyarakat menerima vaksinasi covid-19 di Sulawesi Tengah*. 15(1), 1-1. DOI: <https://doi.org/10.33860/jik.v15i1.430>
- Iskandar, A.H. (2020). *SDGs desa percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan*. *Jurnal Wacana*

Kinerja,24(1),

137-139.

DOI:

<http://dx.doi.org/10.31845/jwk.v24i1.713>.

Julianti, R., Nasirun, H.M., & Wembrayarli. (2018). Pelaksanaan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di lingkungan sekolah. Jurnal Ilmiah Potensia, 3(1), 11-17. DOI: <https://doi.org/10.24893/jkma.v8i1.123>

Juliati, Badiran, M., & Ain, N. (2019). Perankader dalam pelaksanaan kegiatan posyandu di Dusun Titipanjang wilayah kerja Puskesmas Bunut Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2019. Jurnal Mutiara Kesehatan Masyarakat, 4(2), 72-80.

Lestari, P.A., & Lestari, N.P.E.B. (2019). Pelatihan aplikasi perkantoran menggunakan Microsoft Office di Panti Asuhan Rumah Impian Kota Denpasar. Jurnal Lentera Widya, 1(1), 30-34. DOI: <https://doi.org/10.35886/lenterawidya.v1i1.63>

Lubis, Z., & Syahri, I.M. (2015). Pengetahuan dan tindakan kader posyandu dalam pemantauan pertumbuhan anak balita. Jurnal Kesehatan Masyarakat, 11(1), 65-73.

Mayowan, Y. (2017). Penerapan teknologi informasi dan komunikasi di desa. PROFIT: Jurnal Administrasi Bisnis, 10(1), 14-23.

Mendagri. (2016). Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

- Muslim, F.H., Sudarsono, B., Wijaya, A.P. (2017). Verifikasi letak segmen batas indikatif berdasarkan aspek teknis dan non-teknis. *Jurnal Geodesi Undip*, 6(1), 128-137.
- Nursetiawan, I. (2020). Peningkatan pelayanan pemerintahan desa berbasis Smart Village. *Dinamika: Jurnal Ilmiah dan Ilmu Administrasi Negara*, 7(1), 112-120. DOI: <http://dx.doi.org/10.25157/dinamika.v7i1.3420>
- Purba, H.S., Sukmawati, A., Adini, M.H, & Sari, D.P. (2018). Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada lingkungan pemerintahan desa di Kecamatan Sungai Pandan. *Jurnal Bisnis dan Pembangunan*, 7(1), 41-44. DOI: <http://dx.doi.org/10.20527/jbp.v7i1.4743>
- Putri, K.E., Wiranti, K., Ziliwu, Y.S., Elvita, M., Frare, D.Y., Purdani, R.S., & Niman, S. (2021). Kecemasan masyarakat akan vaksinasi covid-19. *Jurnal Keperawatan Jiwa (JKJ): Persatuan Perawat Nasional Indonesia*, 9(3), 539-548. DOI: <https://doi.org/10.26714/jkj.9.3.2021.539-548>
- Retnasari, L., Suyitno, & Hidayah, Y. (2019). Penguatan peran taman pendidikan alquran (TPQ) sebagai pendidikan karakter religius. *Jurnal SOLMA*, 08(01), 32-38.
- Rokhman, M.M., Wibowo, S.A., Pranoto, Y.A., & Widodo, K.A. (2018). Pelatihan pemanfaatan microsoft office pada staf pengajar di SMPLBN (Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Negeri) Kota

Malang. *Jurnal Mnemoni*, 1(1), 4-9. DOI: <https://doi.org/10.36040/mnemonic.v1i1.12>

Satrya, N.L.D.P., & Parwata, A.A.G.O. (2018). Penegasan batas wilayah desa di Kota Denpasar. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 06(02), 1-14.

Sofianto, A. (2019). Inovasi manajemen pemerintahan berbasis aplikasi digital di Provinsi Jawa Tengah. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 3(2) 99-108. DOI: 10.21787/mp.3.2.2019.99-108

Suyitno. (2018). Peran taman pendidikan Al-Qur'an (TPA) dalam pendidikan karakter. *EDUKASI: Jurnal Penelitian & Artikel Pendidikan. Edisi Khusus: Luaran Hasil Seminar Nasional FKIP 2018*, 9-16. DOI: <https://doi.org/10.31603/edukasi.v0i0.2352>

Talitha, S.A.N., Makmur, M., & Siswidiyanto. (2018). Penetapan dan penegasan batas desa berdasarkan Permendagri No. 27 Tahun 2006. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(1), 1-7.

Umra, A.Y. (2015). Penegasan batas wilayah antara Desa Besiq dan Desa Mantar yang masuk areal perusahaan PT. Harapan Kaltim Lestari. <http://eprints.itn.ac.id/1533/1/JURNAL%20ANDRY.pdf>, diakses tanggal 21 November 2021.

Wirapuspita, R. (2013). Insentif dan kinerja kader posyandu. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 9(1), 58-65.

Zainudin, Arisinta, O., & Sahid, M. (2018). SIMDES (sistem informasi manajemen desa). *Jurnal Abdiku*, 1(2), 81-88.